

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DI SMA NEGERI 7 PURWOREJO

POLICY IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION IN SMA NEGERI 7 PURWOREJO

Rinda Much Zakaria

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP, Universitas Negeri Yogyakarta,
miripandywarholl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian adalah guru dan siswa. Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo. Setting dalam penelitian ini di SMA Negeri 7 Purworejo. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo meliputi : (1) Interpretasi, (a) Landasan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan adalah kurikulum 2013, (b) Pemahaman guru pendidikan kewirausahaan di sekolah, (2) Organisasi, (a) Guru sebagai pelaksana menyampaikan materi kepada siswa, (b) Kurikulum 2013 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, (c) Pengadaan anggaran dan peralatan dilakukan pada awal tahun pelajaran yang diambil dari dana BOS dan iuran SPP, (d) Koordinasi melibatkan banyak pihak sesuai dengan peran yang dimiliki, (e) Penyusunan jadwal dilakukan pada awal tahun pelajaran dengan mempertimbangkan rpp dan rencana kegiatan sekolah, (3) Aplikasi, Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh seluruh warga sekolah dengan pengelolaan dilakukan bersama-sama.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kewirausahaan, SMA Negeri 7 Purworejo*

Abstract

This study aims to describe policy implementation of entrepreneurship education in SMA Negeri 7 Purworejo. This research is descriptive research with qualitative approach. Subjects of this research are teacher and students. Object of this research is entrepreneurship education in SMA Negeri 7 Purworejo. Setting this research was conducted in SMA Negeri 7 Purworejo. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. Data analysis with using data collection, data reduction, and data presentation. Validity of this research using triangulation techniques and engineering resources. The results of this study show that: 1) Interpretation, (a) The implementation of entrepreneurship education based on 2013 curriculum. (b) Teachers understand how policy implementation in school. 2) Organisation, a) Teacher as implementor submit the matter to student, (b) 2013 Curriculum be guidance in the implementation of entrepreneurship education, (c) Financial resources and equipment, procurement of budget and equipment at the beginning of the year taken from BOS funds. (d) Coordination involves many parties according to their role. (e) The schedule done at the beginning of school year considering with rpp and school activity. (3) Application, Implementation of activities resident with management who held together.

Keywords: *policy implementation, policy sports class, classes in high school sports*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal mendasar yang penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan untuk belajar dan berproses untuk menjalani kehidupannya. Soeyono & Sumarno (2012: xii) berpendapat pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu memberikan andil bagi perkembangan masyarakatnya, bukan sebaliknya pendidikan yang justru memisahkan diri dari masyarakatnya. Untuk itu dikembangkan prinsip pendidikan bukan saja menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, namun juga perlu dilaksanakan dengan basis modal sosial dan modal budaya. Pendidikan dalam hal ini memiliki peranan penting dalam masyarakat.

Dalam proses menjalani kehidupan manusia dihadapkan pada berbagai bentuk pola kehidupan baik itu kebutuhan hidup maupun pola pikir masyarakat itu sendiri. Pemenuhan kebutuhan akan hidup berhubungan dengan apa yang akan digunakan untuk bekal menghidupi dirinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang perlu bekerja. Untuk memperoleh penghasilan tidak semua orang dapat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, sehingga ia membutuhkan pekerjaan dari orang lain. Mengingat minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia ada perlunya seorang individu juga memikirkan hajat hidup orang lain. Memikirkan hajat hidup orang lain di sini dapat diartikan menyediakan ruang pekerjaan

bagi individu lainnya demi pemenuhan kebutuhan hidup orang lain.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu sepuluh tahun terhitung sejak 2005 hingga 2015 terdapat ketimpangan antara jumlah pencari kerja, lapangan pekerjaan yang tersedia dan pemenuhan tenaga kerja yang ada. Pada tahun 2005 jumlah pencari kerja sebanyak 382.706 orang, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia hanya 167.724 tempat. Apabila diprosentasi ketersediaan lapangan pekerjaan ini hanya 43,8% dari jumlah tenaga kerja terdaftar, sedangkan hanya 84,2% tenaga kerja yang terserap atau hanya 36,9% dari jumlah pencari kerja terdaftar. Dalam rentang tahun berikutnya pada 2010 terjadi peningkatan prosentase jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia yaitu 48%. Namun, peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan ini tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja yang hanya 65,3% atau 31,5% dari jumlah tenaga kerja terdaftar. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan prosentasi baik itu perbandingan jumlah lapangan pekerjaan terdaftar maupun jumlah tenaga kerja terserap terhadap jumlah pencari kerja terdaftar. Di tahun 2015 terdapat 59,1% lapangan pekerjaan tersedia dan 89% penyerapan tenaga kerja atau 52,6% dari jumlah pencari kerja terdaftar yang saat itu berjumlah 1.410.028 orang (Sumber: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/984>).

Tidak tersedianya lapangan pekerjaan

yang mencukupi bagi masyarakat Indonesia akan berdampak pada kehidupannya. Di era sekarang ini permasalahan mengenai timpangnya jumlah pencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun juga seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dalam permasalahan ini pemerintah harus jeli dalam melihat celah untuk menemukan solusi dalam permasalahan pengangguran ini.

Timpangnya jumlah pencari kerja terdidik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia saat ini merupakan bukti nyata bahwa untuk dapat turut mensejahterakan bangsa tidak bisa hanya dengan memperoleh pelajaran di kelas. Pendidikan melalui prosesnya dapat mengarahkan peserta didik nantinya untuk dapat berperan serta dalam menyelesaikan masalah pengangguran di Indonesia. Pendidikan diharapkan mampu untuk menuntun siswa berpikir kreatif. Sekolah sebagai salah satu lembaga penyelenggara pendidikan perlu melihat kegiatan non akademik yang dapat dikembangkan. Pendidikan tidak hanya melulu belajar di kelas.

Entrepreneurship merupakan salah satu hal yang dianggap mampu menyelamatkan permasalahan pengangguran. Pengenalan atau bahkan penerapan pendidikan kewirausahaan sejak dini di sekolah mampu memberikan dorongan bagi siswa untuk berpikir kreatif. Saroni (2012:23) mengatakan” setiap individu seharusnya

selalu berusaha untuk mempersiapkan dirinya agar mampu hidup dengan kemampuan masing masing. Kegiatan wirausaha adalah langkah konkret untuk mewujudkan kondisi tersebut. Selanjutnya Saroni (2012:11) mengatakan

“.... membimbing anak didik untuk belajar wirausaha sejak sekolah diharapkan dapat dijadikan sebagai muatan aplikatif untuk menciptakan orang orang yang siap menghadapi kehidupan berdasarkan kemampuan dirinya. Belajar wirausaha berarti belajar untuk mengkondisikan diri agar anak didik tidak tergantung pada lapangan pekerjaan dari orang lain. Hal ini karena kegiatan wirausaha membiasakan anak didik melakukan kegiatan ekonomi secara mandiri. Anak didik dibimbing dan diajari untuk melakukan kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan secara mandiri.”

Pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan hendaknya terarah untuk memberikan bekal kepada peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan lanjutan, bukan untuk mencari pekerjaan. Peran pendidikan kewirausahaan di sini adalah memupuk jiwa *entrepreneur* peserta didik untuk nantinya bersama masyarakat melakukan inovasi-inovasi untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi lingkungannya.

Barnawi & Arifin (2012:16) mengatakan :

“nilai nilai *entepreunership* harus diintegrasikan ke dalam lingkungan sekolah

mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas serta pendidikan nonformal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan tipe sekolah yang dapat mendidik siswanya berpikir mencipta, bukan malah menyandarkan harapan kepada orang lain. “

Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dalam mata pelajaran ditunjukkan dengan adanya mata pelajaran muatan lokal (mulok) prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini diselenggarakan dengan melihat potensi lingkungan SMA Negeri 7 Purworejo. Silabus untuk mata pelajaran ini berbeda-beda di tiap tingkatan kelasnya. Produk hasil prakarya siswa nantinya akan dipasarkan melalui situs *online* maupun dipajang pada etalase yang disediakan sekolah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Sukmadinata (2012: 60) mengatakan penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Setting Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Purworejo sejak 14 Maret 2017 sampai dengan 30 Oktober 2017.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa SMA Negeri 7 Purworejo.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan seperti reduksi, penyajian dan verifikasi data (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2007: 337). Data data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan berdasarkan pada pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability* (Sugiyono, 2007: 366). Penelitian dilakukan dengan menggunakan triangulasi data teknik dan sumber yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2007: 330).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo

1. Interpretasi

Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo diatur dalam Permendikbud No. 24 Tahun

2016 yang berpedoman kepada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menyebutkan bahwa pendidikan kewirausahaan di sekolah salah satunya dilaksanakan ke dalam mata pelajaran yaitu prakarya dan kewirausahaan. Mata pelajaran ini diberikan kepada seluruh siswa kelas 10, 11 dan 12 yang mana tiap-tiap tingkatan kelas memiliki konsentrasi bidang kewirausahaan yang berbeda-beda.

2. Organisasi

a. Pelaksana Kebijakan

Guru sebagai pelaksana kebijakan pendidikan kewirausahaan mengerti akan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggung jawab di sekolah. Dalam pelaksanaannya Guru bersama-sama dengan kurikulum menyusun rencana kegiatan dan materi yang akan disampaikan di sekolah.

b. Standar Prosedur Operasi

Pendidikan kewirausahaan di sekolah sesuai dengan yang tercantum pada Permendikbud No. 24 Tahun 2016 berpedoman pada kurikulum 2013. Pendidikan kewirausahaan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan dan kesiapan sekolah. Hal ini dilakukan agar siswa nantinya mampu mengembangkan atau memanfaatkan budaya lingkungan sekolah yang ada.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Pengadaan anggaran dilakukan dengan merinci anggaran dan

disesuaikan dengan kebutuhan apa saja yang akan dibelanjakan dalam satu tahun ke depan. Rincian anggaran ini kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Anggaran belanja Sekolah (RABS) yang akan disetujui oleh Kepala Sekolah dan Komite.

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan kewirausahaan disampaikan guru kepada Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum yang kemudian didiskusikan dengan manajemen sekolah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dilakukan di tiap awal tahun pelajaran sekolah. Pengadaan ini bersumber dari uang spp yang dibayarkan orang tua siswa dan dana BOS.

d. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dilakukan dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Kepala sekolah yang mendapatkan instruksi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo menyampaikan kepada guru, karyawan dan komite. Pendidikan kewirausahaan yang dilaksanakan di SMA Negeri 7 Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman kepada kurikulum 2013.

e. Penetapan Jadwal Kebijakan

Jadwal Kegiatan disusun pada awal tahun pelajaran yang dilakukan oleh kurikulum bersama guru. Jadwal kegiatan disusun untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa 5 hari dalam seminggu untuk jangka waktu satu tahun.

Jadwal kegiatan disusun dengan berdasarkan pada kurikulum 2013 dan menyesuaikan kompetensi yang dimiliki sekolah. Kemampuan sekolah dalam melaksanakan kegiatan akan mempengaruhi penyusunan jadwal kegiatan.

3. Aplikasi

a. Komunikasi

Sebagai lembaga pendidikan di bawah naungan pemerintah SMA Negeri 7 Purworejo melaksanakan pendidikan kewirausahaan sesuai dengan kurikulum 2013 yang secara langsung penetapan ini melibatkan seluruh warga sekolah.

Sosialisasi dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai materi isi kegiatan dan tujuan yang ingin dicapai. Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan kepada siswa di tiap awal tahun ajaran mengenai maata pelajaran Prakarya dan kewirausahaan.

b. Sumber Daya

Sumber Daya manusia dalam implementasi kebijakan pendidikan

kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo merupakan guru-guru mata pelajaran lain yang linear, hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 4 Tahun 2015 yaitu terdiri dari guru-guru fisika, kimia, biologi dan ekonomi. Kondisi guru pengajar SMA negeri 7 Purworejo tidak ada yang merupakan lulusan pendidikan kewirausahaan maka kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada guru-guru mata pelajaran yang linear untuk mengikuti penajaman materi kewirausahaan.

Pengadaan sarana dan prasarana dalam pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo bergantung kepada anggaran yang disediakan. Anggaran sekolah dalam pendidikan kewirausahaan bersumber dari dana BOS dan SPP yang dibayarkan orang tua siswa, sehingga tidak ada pungutan yang dilakukan sekolah di luar hal tersebut. Kompetensi guru dalam pendidikan kewirausahaan diharapkan akan mampu membimbing siswa di setiap kegiatan, oleh karena itu sekolah selalu mengupayakan adanya peningkatan kompetensi guru tersebut.

SMA Negeri 7 Purworejo menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kelangsungan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya laboratorium kewirausahaan, ruang budiday, peralatan praktik

kewirausahaan, koperasi siswa, kantin kejujuran dan pameran kewirausahaan.

c. Disposisi

Pendidikan kewirausahaan dipahami guru sebagai bekal siswa agar dapat mandiri dengan keterampilan yang diberikan di sekolah. Bekal keterampilan yang dimiliki ini diharapkan akan mampu memberikan solusi atas keterbatasan lapangan pekerjaan

Pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo tidak lepas dari kerjasama para implementornya yaitu guru, kepala sekolah dan komite. Kerjasama dilakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan rapat yang diadakan untuk memutuskan setiap permasalahan yang ada. Dengan jalan ini pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat berjalan secara optimal.

Kepala sekolah dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah turut berpartisipasi. Kepala sekolah bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang diadakan, selain itu pula turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang ada.

Guru sebagai mediator antara kebijakan dengan sasarannya yaitu siswa diharapkan mampu berperan dengan baik di dalam maupun di luar kelas. Guru menyampaikan materi banyak memanfaatkan media presentasi, sehingga komunikasi yang dibangun hanya satu arah. Hal ini perlu menjadi

pemikiran sebab komunikasi yang dibangun guru diharapkan akan mampu menarik siswa untuk lebih komunikatif dan ekspresif.

d. Struktur Birokrasi

Guru dalam implementasi pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo memiliki peranan penting. Guru mensosialisasikan pendidikan kewirausahaan kepada siswa agar siswa mengenal mengenai hal yang akan dipelajari. Peran guru dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan adalah menyampaikan materi yang telah disusun sesuai dengan pedoman pada kurikulum 2013, selain itu guru membimbing siswa dalam kegiatan praktik kewirausahaan.

4. Pendidikan Kewirausahaan

SMA Negeri 7 Purworejo memperkenalkan siswa dengan keterampilan-keterampilan yang dapat dijadikan bekal hidup nantinya melalui pendidikan kewirausahaan. Pemerintah bekerjasama dengan sekolah melaksanakan pendidikan kewirausahaan dengan harapan siswa dapat mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Pendidikan kewirausahaan penting diberikan sejak dini agar nantinya siswa dapat secara mandiri menyediakan lapangan pekerjaannya.

Pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya dan

memilikiperannya masing-masing. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah membutuhkan kerjasama banyak pihak agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kerjasama yang dibangun ini secara langsung akan dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan kewirausahaan di sekolah dan diikuti dengan baik oleh siswa. Partisipasi siswa dalam pendidikan kewirausahaan akan mampu mengasah keterampilan mereka sebagai bekal dikemudian hari.

Pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo diharapkan akan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan ini adalah karena erbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, sehingga siswa nantinya akan dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Sekolah sebagai sarana belajar turut andil dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Di sekolah siswa diajak untuk mengasah keterampilan berwirausaha dengan berbagai kegiatan yang ada. Siswa diberi kesempatan untuk memilih kegiatan kewirausahaan yang dikehendaki agar sesuai dengan keterampilan sehingga dapat mengikuti secara maksimal.

Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah diperuntukkan bagi anak yang menyandang status siswa SMA Negeri Purworejo. Pendidikan kewirausahaan diberikan

kepada siswa sesuai dengan jadwal yang telah disusun guru dengan kurikulum. Berdasarkan hal ini diharapkan siswa akan mampu mengikuti kegiatan yang diadakan dengan baik. Pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo merupakan salah satu rencana pemerintah untuk mengatasi persamsalahan pengangguran akibat terbatasnya lapangan pekerjaan. Pendidikan kewirausahaan disamapaikan sejak dini di sekolah agar siswa dapat mengenal sihingga memiliki antusias untuk mengikuti kegiatan dengan baik. Pengenalain kegiatan yang baik mendapat tanggapan positif dari siswa, sehingga pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dapat berjalan maksimal seperti yang diharapkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo terdiri atas mata pelajaran Prakarya dan kewirausahaan, Koperasi siswa dan Kantin Kejujuran. Mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan seperti yang tercantum dalam kurikulum 2013 terdiri atas 4 konsentrasi bidang, yaitu kerajinan, pengolahan, budidaya dan rekayasa teknologi. Pendidikan Kewirausahaan SMA Negeri 7 Purworejo mengembangkan konsentrasi bidang kerajinan, pengolahan dan budidaya. Peneliti mengkaji implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dengan mengkaji komponen-komponen berikut :

1. Interpretasi

Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo berlandaskan pada Permendikbud No. 24 Tahun 2016 yang merupakan turunan dari UU No. 20 Tahun 2003. Pemahaman guru mengenai pendidikan kewirausahaan adalah tentang mata pelajaran di kelas.

2. Organisasi

a. Pelaksana Kebijakan

Guru mengerti tugas pokok, fungsi dan wewenang dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo. Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dilaksanakan dengan berpedoman kepada kurikulum 2013. Guru menyampaikan materi kepada siswa dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan.

b. Standar Prosedur Operasi

Implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo berpedoman pada kurikulum 2013 yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah.

c. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan

Pengadaan Anggaran dan peralatan dilaksanakan di awal tahun pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar dalam rentang waktu satu periode. Pengadaan anggaran dimasukkan dalam rencana anggaran belanja (RAB) kemudian diajukan kepada kepala sekolah untuk disetujui. Pengadaan

peralatan diajukan kepada wakil kepala sekolah bidang Sarana dan Prasarana.

d. Penetapan Manajemen Pelaksana Kebijakan

Koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh warga sekolah SMA Negeri 7 Purworejo.

e. Penetapan Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan disusun sebelum tahun ajaran dimulai dengan melibatkan guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Penyusunan jadwal dipengaruhi oleh program sekolah secara keseluruhan.

3. Aplikasi

a. Komunikasi

Sosialisasi pendidikan kewirausahaan dilaksanakan di awal tahun ajaran baru kepada siswa bertujuan untuk memperkenalkan siswa.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo merupakan guru-guru mata pelajaran yang linear dengan pendidikan kewirausahaan seperti kimia, fisika, biologi dan ekonomi. Peningkatan kompetensi guru dilakukan dengan mengikuti penajaman materi atau diklat yang diadakan instansi terkait. Sarana dan Prasarana yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo sudah dapat mendukung kegiatan, namun tidak sepenuhnya dapat terpenuhi. Pengadaan anggaran dalam implementasi kebijakan pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo

tidak bersumber dari pungutan yang dibebankan kepada siswa selain uang spp yang dibayarkan.

c. Disposisi

Pendidikan kewirausahaan dipahami guru sebagai bentuk bekal yang diberikan kepada siswa agar nantinya dapat dimanfaatkan sesuai dengan kemampuan. Kerjasama yang dilakukan antara kepala sekolah, komite, guru dan karyawan sudah bagus sehingga pendidikan kewirausahaan di SMA Negeri 7 Purworejo dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kepala sekolah memiliki komitmen yang baik dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah yaitu dengan turut andil pada kegiatan yang ada. Guru menyampaikan materi dan membimbing siswa kurang maksimal dikarenakan kemampuan guru dalam menguasai kelas.

d. Struktur Birokrasi

Guru berperan membimbing siswa dalam melaksanakan pendidikan kewirausahaan di sekolah.

Saran

1. Bagi guru, peningkatan kompetensi perlu dilakukan untuk menambah kekayaan intelektual di bidang pendidikan kewirausahaan. Penguasaan kelas perlu ditingkatkan agar kegiatan dapat berjalan secara maksimal dengan bimbingan guru secara baik.
2. Bagi Kepala Sekolah, koordinasi baik dengan instansi terkait maupun kelembagaan intra sekolah perlu

ditingkatkan agar semua pihak dapat sejalan mengenai pelaksanaan pendidikan kewirausahaan.

3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, pengkajian mengenai pendidikan kewirausahaan di sekolah harus selalu dilakukan mengingat pelaksanaannya selalu mengikuti perkembangan masyarakat lingkungan.
4. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini belum sepenuhnya sempurna dan mendetail. Penelitian berikutnya diharapkan secara periodik, artinya data yang diambil di lapangan dilakukan secara berulang sesuai waktu kegiatan berlangsung. Penelitian ini menyentuh secara mendalam bagaimana perkembangan pendidikan kewirausahaan dilaksanakan di sekolah, oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih sempurna.

Daftar Pustaka

- Barnawi, & Arifin M.. (2012). *Schoolpreneurship : Membangkitkan jiwa dan sikap Kewirausahaan Siswa*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media
- BPS. (2016). *Jumlah Pencari Kerja, Lapangan Pekerjaan yang Tersedia dan Pemenuhan Tenaga Kerja*. Diambil pada 8 Agustus 2016, dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/984>

- Depdikbud. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24, Tahun 2016, tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasardan Pendidikan Menengah*
- Saroni, M. (2012). *Mendidik dan Melatih Entepreuner Muda*. Sleman
- Sugiyono. (2009). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sukmadinata, N. S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suryono, Y., & Sumarno. (2012). *Pembelajaran Kewirausahaan Masyarakat*. Yogyakarta: UNY
- Depdikbud. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*